

SISTEM PENJAMINAN MUTU TERPADU MANAJEMEN PENDIDIKAN

Nur Alim

STAI Al-Gazali Soppeng
nuralim1006@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang sistem penjaminan mutu terpadu manajemen pendidikan. Permasalahan dalam penelitian ini tentang pengukuran sistem pengendalian mutu, strategi pencapaian dan sistem penjaminan mutu pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pola pikir deduktif. Analisis data yang dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu: 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, dan 3) Melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan. Pengukuran pengendalian mutu terpadu meliputi: 1) *Precontrol-Feedforward*, di mana pengendalian dilaksanakan sebelum kegiatan dilaksanakan, 2) *Concurrent Control*, yaitu pengontrolan dilaksanakan seiring saat pekerjaan itu berlangsung dan 3) *Feedback Control*, yaitu membuat evaluasi setelah pekerjaan itu selesai dilaksanakan. Strategi pencapaian mutu pendidikan di Indonesia termaktub dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional yang menjadi amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sistem penjaminan mutu mempunyai peran dalam mengendalikan pelaksanaan pendidikan oleh lembaga pendidikan dalam merealisasikan pendidikan yang berkualitas. Sistem penjaminan mutu ini meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal pendidikan dasar dan menengah.

Kata Kunci: *Manajemen Pendidikan, Sistem Penjaminan Mutu Terpadu,*

Abstract

This study discusses the integrated quality assurance system of education management. The study's problems are about measuring quality control systems, achievement strategies, and educational quality assurance systems. This research is library research using a deductive mindset. Data analysis was carried out through 3 stages: 1) Data reduction, 2) Data presentation, and 3) Verification and drawing conclusions. The integrated quality control measurements include 1) Precontrol-Feedforward, 2) Concurrent Control, and 3) Feedback Control. The strategy for achieving the quality of education in Indonesia is contained in achieving the national education goals which are mandated by Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System. The quality assurance system has the function of controlling the implementation of education by educational units to realize quality education. The quality assurance system for primary and secondary education consists of an internal and external quality assurance systems for primary and secondary education.

Keywords: *Education Management, The Integrated Quality Assurance System,*

Pendahuluan

Revolusi industri 4.0 sebagai sebutan untuk masuk pada abad baru yang dikenal dengan abad milenium, mutu merupakan suatu kondisi yang tidak bisa dinafikan dalam realitas sehari-hari. Implementasi konsep mutu atau kualitas pada dunia pendidikan harus dipahami secara utuh dan dikonstruksi dengan fundasi kejujuran untuk mengembangkan suatu sistem penjaminan mutu yang tepat. Eksistensi penjaminan mutu dalam dunia pendidikan harus lebih diarahkan pada aktivitas belajar peserta didik, peningkatan kinerja guru, kolaborasi stakeholder pendidikan, dan memberikan kesempatan yang luas kepada setiap pemimpin satuan pendidikan untuk mengejar standar kualitas yang diharapkan.

Dunia pendidikan saat ini menuntut setiap satuan pendidikan menrekonstruksi dirinya dalam meningkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas lembaga adalah persyaratan utama yang harus dimiliki oleh setiap satuan pendidikan agar keberadaannya terjaga di masyarakat dan dunia pendidikan. Usaha untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan adalah upaya yang hendaknya dapat diusahakan secara berkelanjutan demi pencapaian mutu pendidikan yang baik.

Syafaruddin dan Mesiono (2006) menyatakan bahwa kualitas pendidikan adalah ketepatan antara apa yang menjadi kebutuhan *stakeholder* pendidikan dengan pihak manajemen pendidikan terkait layanan yang diberikan. Landasan filosofinya dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan yang bermutu adalah ketepatan antara masukan, proses, dan keluaran satuan pendidikan dengan apa yang menjadi kebutuhan pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Dengan seiring berjalannya waktu, kualitas pendidikan harus semakin meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan atau kriteria masyarakat menilai pendidikan telah berubah. Masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan sekolah dan mutu lulusan yang dihasilkan oleh sekolah tersebut, untuk itu informasi tentang mutu pendidikan terus menerus menjadi perhatian masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memilih instansi untuk tempat belajar.

Mulyasa (2012) menyatakan bahwa di Indonesia, salah satu isu sentral dalam pendidikan terkait rendahnya kualitas pendidikan pada setiap tingkatan dan lembaga pendidikan. Setiap stakeholder pendidikan, tentunya mengharapkan dan menuntut pendidikan yang bermutu. Untuk itu, pemerintah telah menyadari kondisi demikian, sehingga berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Meskipun demikian, pelaksanaan penjaminan dan pengembangan kualitas pendidikan sampai sekarang masih menemui berbagai problematika yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Satuan pendidikan belum mempunyai pemahaman yang merata tentang aspek-aspek dan indikator-indikator penilaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), sebagai tolak ukur dari kualitas pendidikan, 2) Masih belum terpadunya pendataan pada berbagai penyelenggara pendidikan sebagai bentuk pemetaan kualitas pendidikan, 3) Masih terbatasnya implementasi pemantauan komponen mutu di satuan pendidikan dalam upaya penjaminan dan peningkatan kualitas pendidikan, 4) Belum dimanfaatkannya hasil tindak lanjut pendataan kualitas pendidikan untuk kebutuhan peningkatan kualitas berkelanjutan, dan 5) Belum dipahaminya secara utuh implementasi penilaian Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan instrumen penilaiannya sebagai sebuah kebutuhan bagi satuan pendidikan (Syafaruddin, 2016).

Sani dkk. (2015) mengemukakan bahwa setiap lembaga pendidikan yang telah mengimplementasikan manajemen mutu terpadu hendaknya dapat sudah mampu memenuhi 8 SNP yang telah menjadi regulasi pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan regulasi dan petunjuk teknis dalam implementasi 8 SNP sehingga setiap lembaga pendidikan dapat melakukan tahapan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Hal ini bertujuan agar dapat diidentifikasi pencapaian kualitas manajemen lembaga pendidikan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam regulasi.

Upaya penjaminan kualitas pendidikan sangat urgen untuk diimplementasikan oleh lembaga pendidikan dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan. Peningkatan proses dan hasil pendidikan menjadi fokus dan konsentrasi utama dalam perumusan penyusunan program penjaminan kualitas pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan secara efektif dan efisien akan menjadi indikator utama bahwa mutu pendidikan telah dapat ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan strategi dan metode yang berfokus pada pendidikan *skill*, baik pada aspek mental maupun fisik secara komprehensif dan secara khusus kualitas pendidikan yang berfokus pada bidang akademis.

Dari latar belakang di atas, dapat diformulasikan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana pengukuran sistem pengendalian mutu pendidikan? 2) Bagaimana strategi pencapaian mutu pendidikan?, dan 3) Bagaimana sistem penjaminan mutu pendidikan?

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dengan mengacu pada studi kritis, filosofis dan komprehensif pada naskah-naskah pustaka yang terkait. Naskah-naskah tersebut didudukkan sebagai pusat gagasan yang mampu melahirkan ide atau gagasan lainnya. Olehnya itu, kajian ini mempergunakan teknik berpikir deduktif. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan terdiri dari 3 tahapan, yaitu: 1) *Reduction*, 2) *Display*, dan 3) *Conclusion and Verification* (Agus Salim, 2006). Setelahnya dirumuskan kesimpulan sebagai bagian dari aktivitas konstruktif yang holistik. Dengan melakukan pengambilan kesimpulan, implementasi metode penelitian ini merupakan upaya memahami dan menemukan kebenaran.

Hasil

A. Pengukuran Sistem Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu pada dasarnya melingkupi keutuhan kegiatan dalam mewujudkan produk dan jasa sejak tahapan pembuatan produk/jasa sampai hal tersebut dimanfaatkan atau dipakai oleh *customer* sampai mereka puas. Selaras dengan konsep tersebut, pengelolaan mutu pendidikan terkait dengan aspek masukan, proses dan keluaran. Karenanya, dalam melakukan pengelolaan kualitas pendidikan, pengelolaan diaksentuasikan pada aspek masukan, proses dan keluaran pendidikan.

Juran (1988) mendeskripsikan bahwa pengontrolan mutu merupakan tahapan manajemen yang didalamnya terdapat beberapa aktivitas yaitu: 1) Melakukan penilaian terhadap kinerja riil, 2) Memadankan antara kinerja riil dengan tujuan yang telah dirumuskan, dan 3) Melakukan langkah strategis terhadap perbedaan yang ada. Kegiatan pengontrolan mutu dilaksanakan untuk menjamin proses berjalan selaras dengan perencanaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat diraih. Realitas ini perlu mendapatkan perhatian, karena perilaku individu dalam sebuah organisasi tidak selamanya selaras dalam mendukung perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Syaodih (2006) mengemukakan bahwa dalam suatu sistem pengendalian mutu pada dasarnya memiliki 4 aspek, yaitu: 1) Alat observasi yang dapat mengidentifikasi, mengamati, dan menilai serta mendeskripsikan aktivitas-aktivitas yang dikontrol, 2) Alat pengukur yang dapat melakukan penilaian kinerja dari suatu aktivitas, 3) Alat merubah sikap untuk mengubah kinerja apabila dibutuhkan, dan 4) Alat untuk mempublikasikan informasi pada yang lain.

Kesuksesan seorang pimpinan lembaga pendidikan atau pengawas pendidikan dalam mengimplementasikan pengontrolan mutu di samping harus dilaksanakan secara terstruktur juga harus memperhatikan beberapa prakondisi yang harus dimiliki oleh satuan pendidikan. Realitas ini direalisasikan dalam wujud perilaku, tanggung jawab, dan gagasan dari semua unsur yang terkait dalam pelaksanaan aktivitas pendidikan di satuan pendidikan.

Fattah (2006) menyatakan bahwa tahapan prakondisi yang harus diwujudkan oleh lembaga pendidikan, yaitu: 1) Mengganti mindset lembaga pendidikan sebagai bagian produksi menjadi bagian pelayanan jasa, 2) Menitikberatkan atensi pada proses secara lebih terstruktur, 3) Mengimplementasikan mindset dan strategi jangka panjang, 4) Memiliki tanggung jawab yang kuat pada kualitas, dan 5) Memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kepala sekolah sebagai pemimpin dalam satuan pendidikan dalam melakukan penilaian pengendalian mutu dapat dilakukan melalui beberapa teknik yang salah satunya adalah penilaian pengendalian mutu adalah Model Certo yang meliputi: 1) *Precontrol-Feedforward*, di mana penilaian yang dilaksanakan sebelum mulai aktivitas, contohnya dalam upaya merealisasikan pendidikan yang berkualitas dengan mengangkat tenaga pendidik yang profesional, 2) *Concurrent Control*, yaitu pengendalian dilaksanakan selaras dengan implementasi aktivitas, dan 3) *Feedback Control*, yaitu melaksanakan pengukuran dan penyempurnaan setelah aktivitas atau program telah selesai dilaksanakan (Sofyan, 2001).

Pada tahapan pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan, tujuan penilaian pengendalian mutu diarahkan pada bidang masukan pendidikan, proses pendidikan dan keluaran atau hasil pendidikan. Syaodih (2006) mengemukakan bahwa penilaian pengendalian mutu pendidikan diarahkan pada aspek utama dalam dunia pendidikan yang meliputi: kurikulum, bimbingan siswa, dan manajemen pendidikan. Aspek kurikulum terkait dengan menformulasikan tujuan pendidikan, bahan ajar, pembelajaran serta penilaian, baik program pembelajaran di sekolah secara holistik maupun permata pelajaran. Aspek bimbingan siswa terkait dengan pendampingan siswa dalam bentuk kegiatan bimbingan dan konseling utamanya pada siswa yang memiliki masalah dengan diri yang berimplikasi pada pembelajarannya. Sedangkan aspek manajemen pendidikan terkait dengan usaha pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan segala potensi yang dimiliki satuan pendidikan. Aspek ini meliputi manajemen personalia, siswa, sarana dan prasarana, pembiayaan dan hubungan masyarakat serta kerjasama dengan pihak luar sekolah. Ketiga aspek ini memiliki arah yang sama, yaitu pengembangan potensi siswa secara maksimal. Dari beberapa hasil observasi yang telah dijelaskan di atas maka peneliti menemukan beberapa pengukuran sistem pengendalian mutu bertujuan untuk memahami bagaimana mutu dalam suatu sistem pendidikan atau organisasi dapat diukur, dipantau, dan ditingkatkan. Berikut adalah pembahasan hasil dari penelitian terkait pengukuran sistem pengendalian mutu: 1) Pengendalian mutu berbasis standar, yaitu Pengukuran sistem pengendalian mutu biasanya dilakukan dengan merujuk pada standar-standar yang telah ditetapkan, seperti **ISO 9001** untuk sistem manajemen mutu, atau standar pendidikan nasional yang mengatur kualitas pembelajaran, kurikulum, dan tenaga pengajar. Standar ini menjadi acuan utama untuk menentukan indikator-indikator pengukuran mutu. Dalam konteks pendidikan, pengendalian mutu mencakup penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, ketercapaian kompetensi siswa, efektivitas kurikulum, serta profesionalisme tenaga pengajar. 2). Indikator mutu pendidikan yaitu, mengukur sistem pengendalian mutu pendidikan melalui beberapa indikator utama. yaitu pertama kinerja akademik siswa yaitu diukur melalui hasil tes, evaluasi, dan asesmen untuk melihat pencapaian kompetensi. Kedua, kualitas tenaga pendidik yang dinilai berdasarkan sertifikasi, pelatihan, dan kualifikasi yang dimiliki, mengingat profesionalisme mereka sangat penting bagi mutu pendidikan. Ketiga, sarana dan prasarana, termasuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi, juga menjadi faktor kunci dalam mendukung pembelajaran. Selain itu keempat yaitu manajemen lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari efisiensi penggunaan sumber daya dan pengambilan keputusan. Kelima, tingkat kepuasan siswa dan orang tua dievaluasi melalui survei untuk memastikan pelayanan pendidikan yang kondusif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengukuran dan pengendalian mutu dalam sistem pendidikan memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup berbagai aspek seperti kinerja akademik, profesionalisme tenaga pendidik, kualitas sarana, serta manajemen pendidikan. Pengendalian mutu yang efektif harus dilakukan secara sistematis dengan melibatkan evaluasi berkala dan tindakan korektif yang terarah. Hasil pengukuran ini menjadi dasar bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan.

B. Strategi Pencapaian Mutu Pendidikan

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia pada umumnya disebabkan hal-hal seperti permasalahan efektivitas, efisiensi dan standarisasi pembelajaran. Sedangkan problematika khususnya antara lain: 1) Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana fisik, 2) Rendahnya profesionalisme tenaga pendidik, 3) Kurangnya tingkat kompensasi tenaga pendidik yang berimplikasi pada tingkat kesejahteraannya, 4) Rendahnya hasil belajar siswa, 5) Kurangnya kesempatan warga negara dalam menikmati pendidikan, dan 7) Tingginya *cost* pendidikan (I Wayan D.A, dkk, 2017).

Dari hasil penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa strategi untuk mengatasi masalah tersebut, yang secara umum berbasis pada substansi dari kebijakan pendidikan nasional, khususnya yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, strategi yang ditawarkan tidak hanya berbasis pada perbaikan teknis tetapi juga didasari oleh landasan hukum yang kuat serta prinsip-prinsip pendidikan nasional.

Dalam upaya memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, perlunya melihat secara multi perspektif, diantaranya kebijakan pada aspek pendidikan yang berlandaskan pada substansi pendidikan nasional. Berbasis pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang definisi pendidikan dapat diformulasikan strategi dalam mendapatkan kualitas pendidikan yang tinggi di Indonesia, yaitu: 1) Implementasi pendidikan agama serta karakter yang baik. Maksud dari strategi yang pertama ini yaitu Pendidikan agama dan karakter ini penting karena pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga berakhlak baik, memiliki etika, serta moralitas yang tinggi. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. 2) Peningkatan kualitas dan implementasi kurikulum yang mengacu pada kemampuan/kompetensi. Artinya Peningkatan kualitas kurikulum yang mengacu pada kompetensi menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Kurikulum harus mampu mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar dan kemajuan teknologi. Perubahan kurikulum tidak hanya harus menyentuh aspek teoretis tetapi juga aplikatif, sehingga lulusan mampu bersaing di era global. Selain itu, penerapan kurikulum harus fleksibel dan adaptif, sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman. 3) Pelaksanaan belajar yang edukatif dan komunikatif. Artinya Pembelajaran yang edukatif dan komunikatif juga menjadi salah satu solusi yang diajukan dalam penelitian ini. Proses belajar-mengajar yang efektif memerlukan interaksi yang baik antara guru dan siswa, sehingga suasana pembelajaran menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Pendekatan pembelajaran berbasis siswa (*student-centered learning*) harus lebih diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. 4) Penilaian, akreditasi dan pelaksanaan sertifikasi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan, hal ini bermaksud bahwa Penilaian, akreditasi, dan sertifikasi lembaga pendidikan serta tenaga kependidikan juga penting untuk menjaga standar mutu pendidikan. Proses akreditasi harus dilaksanakan dengan objektif dan konsisten untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Sertifikasi tenaga pendidik juga berperan penting untuk memastikan kualitas guru, yang berujung pada peningkatan kualitas pembelajaran. 5) Pengembangan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya Rendahnya profesionalisme tenaga pendidik, sebagaimana diidentifikasi dalam hasil penelitian, perlu ditingkatkan melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Guru yang profesional tidak hanya ditandai dengan penguasaan materi, tetapi juga kemampuan untuk menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6) Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas, hal ini diartikan bahwa melalui penelitian ini mengungkapkan bahwa keterbatasan akses pendidikan seringkali dipengaruhi oleh tingginya biaya pendidikan, terutama di tingkat pendidikan menengah dan tinggi. Oleh karena itu, strategi pengelolaan biaya yang lebih terjangkau dan adil perlu diterapkan agar seluruh warga negara dapat menikmati layanan pendidikan yang berkualitas. 7) Pengelolaan biaya pendidikan pendidikan yang mengacu pada prinsip keadilan dan pemerataan. Maksudnya manajemen pendidikan yang otonom juga menjadi salah satu strategi penting dalam penelitian ini. Otonomi pendidikan memberikan keleluasaan bagi sekolah dan lembaga pendidikan untuk mengelola sumber daya mereka sesuai dengan kebutuhan lokal dan konteks setempat. Ini akan memungkinkan pendidikan menjadi lebih relevan dengan karakteristik daerah, sehingga menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi pada pembangunan daerah tersebut. 8) Merata dan terbukanya pelaksanaan pendidikan, artinya Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung proses pendidikan juga menjadi kunci dalam pencapaian mutu pendidikan. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah dan pemerintah, tetapi juga masyarakat secara umum. Oleh karena itu, strategi pengembangan pendidikan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, komunitas lokal, serta pihak swasta untuk menciptakan budaya belajar yang positif dan berkelanjutan. 9) Implementasi wajib belajar pada pendidikan dasar dan menengah, hal ini bermaksud bahwa ada strategi lainnya yaitu implementasi wajib belajar yang tidak hanya sebatas formalitas, tetapi benar-benar dijalankan dengan serius pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pemerataan akses pendidikan juga harus diprioritaskan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan mereka yang berada di daerah terpencil. 10) Implementasi manajemen pendidikan yang otonom, artinya implementasi manajemen pendidikan yang otonom mengacu pada pemberian kewenangan lebih besar kepada lembaga pendidikan dalam mengelola sumber daya, membuat keputusan, serta mengatur proses belajar mengajar. Otonomi ini memungkinkan setiap sekolah atau lembaga pendidikan untuk menyesuaikan program dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal serta karakteristik peserta didik di daerah masing-masing. Otonomi pendidikan juga berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen sekolah karena keputusan diambil langsung oleh pihak

yang lebih memahami kondisi di lapangan. Dengan otonomi, lembaga pendidikan memiliki keleluasaan untuk mengelola kurikulum, sumber daya manusia, dan anggaran sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan tanpa terlalu tergantung pada kebijakan pusat. 11) Pengembangan peran serta masyarakat, hal ini dimaksudkan bahwa Peran serta masyarakat dalam pendidikan sangat penting untuk membangun sinergi antara sekolah, keluarga, dan komunitas lokal. Masyarakat, terutama orang tua, harus terlibat aktif dalam mendukung proses pendidikan, baik melalui dukungan material maupun moral. Dengan keterlibatan masyarakat, kualitas pendidikan bisa lebih ditingkatkan karena proses pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga komunitas secara keseluruhan. 12) Terciptanya sentral budaya dan pembangunan masyarakat, yaitu Pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun dan memperkuat budaya serta identitas nasional. Pendidikan yang berkualitas harus mampu menjadi pusat kebudayaan, di mana nilai-nilai kearifan lokal dan nasional diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Hal ini penting agar siswa tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecintaan dan penghargaan terhadap budaya mereka sendiri. dan 13) Implementasi kontrol dalam sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan sistematis artinya bahwa sistem kontrol yang terstruktur dan sistematis diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan standar pendidikan nasional diterapkan dengan konsisten dan merata di seluruh Indonesia. Kontrol ini harus mencakup evaluasi berkala terhadap kualitas proses pendidikan, pelaksanaan kurikulum, hasil belajar, serta kinerja tenaga pendidik. Sistem penjaminan mutu yang baik akan memastikan bahwa standar nasional pendidikan dipatuhi oleh seluruh lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta.

Strategi yang mengacu pada definisi tujuan pendidikan nasional tersebut hendaknya dapat dilaksanakan secara istiqamah sebagai bentuk usaha pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mengembangkan kualitas pendidikan di negeri ini. Kedua belah pihak harus bekerjasama secara kolaboratif dan sinergis dalam melaksanakan tindakan aktif, efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pendidikan dalam upaya menumbuhkan masyarakat Indonesia yang berbudaya yang selaras dengan IPTEK dalam rangka menyambut era globalisasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai masalah dan solusi yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia. Strategi-strategi yang diusulkan memiliki dasar yang kuat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional, serta mengarah pada upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan relevansi pendidikan di era globalisasi. Dengan penerapan strategi yang konsisten dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat, diharapkan mutu pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan.

C. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan pemerintah dilaksanakan sepenuhnya oleh lembaga pendidikan. SNP ini menjadi acuan penting dalam mengukur kualitas pendidikan di Indonesia, mencakup berbagai aspek seperti kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, manajemen pendidikan, hingga evaluasi dan akreditasi pendidikan. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, diharapkan pendidikan dapat dijalankan secara terstruktur dan berkesinambungan, sehingga setiap institusi pendidikan dapat mencapai standar yang diinginkan.

Sebagai aspek paling penting dan mendasar, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan penjaminan mutu pendidikan. Didalamnya terdapat acuan tentang garansi dalam aspek apa yang diajarkan, teknik penyampaiannya, siapa yang menyampaikannya, dan mekanisme yang hendaknya dikaitkan didalam pengamatan, penilaian, dan pengontrolan. Tentunya dalam hal ini, tetap fokus pada bagaimana peserta didik dapat mempunyai hasil belajar yang optimal.

Sallis (2005) menyatakan bahwa pengawasan mutu yang dilakukan oleh supervisor atau pengawasan dilaksanakan untuk menjalankan tugas jaminan mutu. Visitasi sebagai bentuk investigasi dan pengujian merupakan teknik penanganan kualitas yang paling umum dan telah banyak digunakan pada dunia pendidikan untuk memastikan apakah standar mutu telah terwujud. Peninjauan atau kontrol mutu berbeda dengan jaminan mutu sehingga sepanjang proses berlangsung, jaminan mutu dimaksudkan untuk menghindari kesalahan berulang terjadi lagi. Jaminan mutu mendesain kualitas pada proses untuk mengecek kejelasan bahwa produk dan jasa yang dibuat telah cocok dengan kualifikasi yang telah ditetapkan.

Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah telah mendeskripsikan bahwa sistem ini merupakan satu kebulatan aspek yang didalamnya terdiri dari aspek organisasi atau lembaga, kebijakan dan aktivitas yang holistik yang mengelola semua hal dalam upaya memaksimalkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan komunikasi yang sistematis, terstruktur, dan kontinyu. Hal ini dimaksudkan agar suatu lembaga pendidikan sebagai sebuah organisasi dapat hidup dan berkembang budaya mutunya secara mandiri. Sistem ini berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan pendidikan oleh lembaga pendidikan dalam merealisasikan pendidikan yang berkualitas. Sistem ini terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dikdasmen dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Dikdasmen.

SPMI Dikdasmen dilaksanakan pada lembaga pendidikan dan diimplementasikan oleh semua unsur dalam lembaga pendidikan. SPMI ini meliputi semua unsur pelaksanaan pendidikan dengan menggunakan berbagai potensi

yang dimiliki satuan pendidikan dalam pencapaian SNP yang telah dirumuskan dan dikeluarkan dalam pedoman manajemen lembaga pendidikan. Aspek penjaminan mutu harus dilakukan secara independen supaya SPMI dapat terlaksana dengan tepat pada lembaga pendidikan. Untuk itu, hal tersebut harus dilakukan di luar manajemen lembaga pendidikan yang sekurang-kurangnya terdiri dari aspek manajemen, guru dan tenaga administrasi lainnya. SPMI dapat dilakukan melewati 5 tahapan siklus, yang terdiri dari: 1) Pendeskripsian mutu yang dilakukan dengan aktivitas Evaluasi Diri Sekolah (EDS) mengacu pada SNP, 2) Pembuatan rencana peningkatan mutu dilakukan dengan membuat rencana peningkatan mutu lembaga pendidikan dan rencana aksi yang mengacu pada peta mutu, regulasi dari pemerintah dalam bentuk kurikulum dan SNP, serta rencana yang esensial dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan, 3) Implementasi rencana pengembangan kualitas lembaga pendidikan dengan melalui kesesuaian kualitas pendidikan dan kesesuaian SNP yang dilakukan dalam manajemen lembaga pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran, 4) Pemantauan dan penilaian dilaksanakan untuk membuktikan implementasi peningkatan mutu telah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan disusun dalam laporan implementasi terlaksananya SNP dan pelaksanaan rencana pemenuhan mutu oleh sekolah, dan 5) Penentuan standar kualitas yang baru dan strategi dalam peningkatannya dari raihan sebelumnya mengacu pada *output* pemantauan dan penilaian dengan penentuan standar mutu yang lebih baik dalam mendorong pembangunan budaya mutu di sekolah (Sabar, dkk, 2019).

SPME Dikdasmen merupakan satu integritas aspek yang terbentuk dari organisasi, kebijakan, dan implementasi yang holistik dan saling terkait dalam melaksanakan visitasi dan evaluasi dengan akreditasi dalam menetapkan kelaikan dan jenjang capaian mutu pada lembaga pendidikan dasar dan menengah. SPME Dikdasmen dilakukan oleh lembaga secara independen di luar lembaga pendidikan, yang direncanakan, dilakukan, dikontrol, dan dikembangkan pemerintah pusat dan daerah, BSNP, dan BAN-S/M sesuai dengan otoritasnya (Sabar, dkk, 2019).

Pembahasan

Sistem Penjaminan Mutu Terpadu (SPMT) dalam Manajemen Pendidikan merujuk pada pendekatan yang holistik dan berkesinambungan untuk memastikan mutu pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sistem ini melibatkan berbagai komponen dalam institusi pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga peningkatan berkelanjutan.

Konsep Sistem Penjaminan Mutu Terpadu SPMT diadopsi dari konsep Total Quality Management (TQM) yang menekankan pada integrasi seluruh elemen institusi untuk mencapai dan mempertahankan standar kualitas yang optimal. Dalam konteks pendidikan, penjaminan mutu terpadu mengacu pada bagaimana setiap proses pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, dipantau dan dievaluasi secara terus menerus untuk meningkatkan hasil pendidikan.

Komponen Utama SPMT

1. Standar Mutu: Institusi pendidikan harus menetapkan standar mutu yang jelas. Standar ini mencakup kompetensi lulusan, kualitas pembelajaran, dan aspek administratif.
2. Proses Pengendalian Mutu: Dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara sistematis. Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa apakah seluruh komponen pendidikan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
3. Evaluasi Internal: Evaluasi dilakukan secara internal oleh lembaga pendidikan itu sendiri melalui unit penjaminan mutu yang berfungsi untuk mengecek kesesuaian antara implementasi pendidikan dengan standar yang ada.
4. Evaluasi Eksternal: Evaluasi juga dilakukan oleh badan eksternal seperti akreditasi nasional atau internasional yang mengaudit proses dan hasil pendidikan.
5. Peningkatan Berkelanjutan (Continuous Improvement): SPMT tidak hanya berfokus pada pencapaian standar tertentu, tetapi juga pada peningkatan kualitas berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari berbagai pihak.

Manajemen Pendidikan dan Implementasi SPMT

Manajemen pendidikan berperan penting dalam implementasi SPMT. Manajemen yang baik harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengontrol proses pendidikan secara efektif. Berikut beberapa aspek dalam manajemen pendidikan yang berhubungan dengan SPMT:

1. Perencanaan Strategis: Merumuskan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang sesuai dengan standar mutu. Dalam perencanaan ini, input dari berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan (stakeholders), sangat penting.
2. Pengorganisasian: Membentuk struktur organisasi yang jelas, terutama dalam unit penjaminan mutu. Tanggung jawab dan peran setiap bagian harus didefinisikan dengan baik.
3. Kepemimpinan: Kepemimpinan yang kuat sangat dibutuhkan untuk mendorong seluruh komponen institusi pendidikan agar memprioritaskan mutu dalam setiap aktivitas.

4. Pengendalian dan Evaluasi: Pengendalian dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas, sedangkan evaluasi untuk memastikan apakah target mutu tercapai.

Manajemen mutu terpadu merupakan suatu media yang dimanfaatkan oleh manajemen dalam suatu organisasi yang menyertakan seluruh potensi yang ada didalamnya dengan melaksanakan koreksi dan pembaruan secara berkelanjutan pada produk, jasa, proses, manusia dan lingkungan yang terkait dengan produk dan manajemen sebuah organisasi dengan menggunakan metode saintifik yang kreatif dan inovatif.

Mutu lembaga dapat diraih apabila setiap bagian lembaga mampu mengoptimalkan potensinya dalam pencapaian tujuan lembaganya. Apabila kualitas yang dihasilkan semakin baik maka semakin maksimal pula *output* dan *outcome* serta reputasi yang diperoleh oleh lembaga yang menerapkannya. Penjaminan mutu pendidikan di Indonesia dirancang agar dapat dilaksanakan secara komprehensif, baik secara internal maupun eksternal. Standar Nasional Pendidikan (SNP) dijadikan tolok ukur untuk menilai apakah mutu pendidikan telah terpenuhi. Namun, sistem ini lebih dari sekadar pemenuhan standar administratif; penjaminan mutu juga merupakan proses transformasi yang harus mencakup perbaikan kualitas secara berkelanjutan melalui evaluasi, pengawasan, dan penilaian.

Pentingnya SPMT dalam Pendidikan

1. Menjamin Kualitas Pendidikan: Dengan adanya SPMT, lembaga pendidikan dapat memastikan kualitas layanan pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas: Penjaminan mutu memberikan laporan dan bukti bahwa institusi pendidikan bertanggung jawab terhadap seluruh proses dan hasil pendidikan yang mereka jalankan.
3. Meningkatkan Daya Saing: Institusi pendidikan yang memiliki sistem penjaminan mutu yang baik akan lebih dipercaya oleh masyarakat, mahasiswa, dan industri, sehingga meningkatkan daya saing institusi tersebut.
4. Mendukung Inovasi: Dengan evaluasi yang berkelanjutan, SPMT juga mendorong adanya inovasi dalam metode pengajaran, kurikulum, dan pengelolaan pendidikan.

Penjaminan mutu tidak hanya menitikberatkan pada hasil akhir (*output*) dari pendidikan, tetapi juga pada proses pembelajaran itu sendiri. Menurut Harvey dan Green (1993), kualitas dalam pendidikan harus dipandang dari berbagai dimensi, termasuk kecocokan tujuan, pemenuhan standar, dan peningkatan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, SPMI dan SPME membantu memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga bagaimana pendidikan dapat mendukung perkembangan kompetensi peserta didik secara holistik, termasuk keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kecakapan emosional.

Menurut studi yang dilakukan oleh Trow (1996), terdapat tiga dimensi utama dalam penjaminan mutu pendidikan: pertama, dimensi kualitas layanan pendidikan yang diberikan; kedua, kualitas sumber daya manusia (tenaga pendidik dan staf administrasi); dan ketiga, kualitas sarana dan prasarana. Di Indonesia, dimensi ini tercakup dalam SNP yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Oleh karena itu, untuk mencapai pendidikan berkualitas, institusi harus memperhatikan semua aspek ini secara seimbang.

Penjaminan Mutu Penjaminan mutu pendidikan di Indonesia juga melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pihak eksternal lainnya seperti BAN-S/M. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif dalam menjamin mutu pendidikan di seluruh tingkat pendidikan. Tidak hanya peran pemerintah yang vital, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam proses akreditasi dan pemantauan mutu pendidikan sangat dibutuhkan, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 28 Tahun 2016.

Ada beberapa tantangan dalam Implementasi Penjaminan Mutu Meskipun konsep SPMI dan SPME sudah diterapkan, tantangan yang signifikan masih terjadi, terutama dalam hal konsistensi implementasi di berbagai wilayah. Salah satu tantangan terbesar adalah disparitas mutu pendidikan di berbagai daerah, yang disebabkan oleh perbedaan sumber daya dan kemampuan lembaga pendidikan dalam memahami serta menerapkan SNP secara tepat. Studi oleh World Bank (2020) menunjukkan bahwa kesenjangan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia masih cukup besar, yang menjadi hambatan utama dalam menciptakan pemerataan pendidikan berkualitas.

Penguatan Sistem Akreditasi Akreditasi sebagai bagian dari SPME merupakan salah satu instrumen penting untuk mengukur kelaikan lembaga pendidikan. Lembaga seperti BAN-S/M memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah dan madrasah telah memenuhi SNP. Akreditasi juga digunakan sebagai alat ukur penting bagi masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan yang berkualitas. Sejalan dengan itu, BAN-S/M terus melakukan perbaikan dalam proses akreditasi, dengan mengintegrasikan teknologi untuk mempermudah proses evaluasi dan pemantauan lembaga pendidikan.

Tantangan dalam Implementasi SPMT

1. Keterbatasan Sumber Daya: Implementasi sistem penjaminan mutu memerlukan sumber daya manusia yang terlatih serta infrastruktur yang memadai.
2. Perubahan Budaya Organisasi: Kadang, institusi mengalami kesulitan dalam menerapkan budaya kualitas di seluruh level organisasi.

3. Resistensi terhadap Perubahan: Beberapa individu atau kelompok dalam institusi pendidikan mungkin menolak perubahan yang diperlukan untuk penerapan SPMT.
4. Pemantauan yang Konsisten: Membutuhkan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses mutu berjalan secara konsisten sesuai standar yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Kajian di atas membawa pada beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pengukuran pengendalian mutu meliputi: 1) *Precontrol-Feedforward*, di mana pengendalian dilaksanakan sebelum kegiatan dilaksanakan, contohnya untuk merealisasikan pendidikan yang berkualitas, maka lembaga pendidikan harus menyeleksi dan menerima hanya guru-guru yang mempunyai kualitas pendidikan dan ketrampilan yang baik (profesional), 2) *Concurrent Control*, yaitu pengontrolan dilaksanakan seiring saat pekerjaan itu berlangsung atau dilakukan, dan 3) *Feedback Control*, yaitu membuat evaluasi dan perbaikan setelah pekerjaan itu selesai dilaksanakan. Strategi pencapaian mutu pendidikan di Indonesia termaktub dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional yang menjadi amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem penjaminan mutu mempunyai peran dalam mengendalikan pelaksanaan pendidikan oleh lembaga pendidikan dalam merealisasikan pendidikan yang berkualitas. Sistem penjaminan mutu ini meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal pendidikan dasar dan menengah.

Pengukuran pengendalian mutu meliputi tiga pendekatan utama 1) *Precontrol-Feedforward*: Pengendalian dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Misalnya, untuk merealisasikan pendidikan yang berkualitas, lembaga pendidikan harus menyeleksi dan merekrut guru-guru yang memiliki kualitas pendidikan, kompetensi, dan keterampilan yang baik, serta memenuhi standar profesionalisme sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan. Langkah ini memastikan bahwa kualitas pengajaran sudah terjamin sebelum proses pembelajaran dimulai. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pencegahan lebih baik daripada perbaikan, sehingga lembaga pendidikan dapat meminimalkan risiko penurunan kualitas sejak awal. 2) *Concurrent Control*: Pengendalian dilakukan secara bersamaan saat pekerjaan atau proses pendidikan berlangsung. Di sini, pemantauan secara real-time dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Misalnya, kepala sekolah atau pengawas pendidikan bisa melakukan supervisi langsung di kelas untuk memantau proses pembelajaran dan memberikan masukan secara langsung agar mutu pendidikan tetap terjaga. Pengendalian ini memastikan bahwa masalah dapat diatasi saat terjadi dan tidak menunggu hingga akhir proses. 3) *Feedback Control*: Pengendalian yang dilakukan setelah kegiatan atau pekerjaan selesai. Dalam konteks pendidikan, ini melibatkan evaluasi hasil belajar siswa, evaluasi kinerja guru, serta penilaian terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan. *Feedback* ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan di masa mendatang. Umpan balik dari hasil evaluasi juga penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan yang ada, sehingga strategi dan kebijakan dapat disesuaikan demi peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Strategi pencapaian mutu pendidikan di Indonesia berakar pada pencapaian tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menegaskan pentingnya pengelolaan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Tujuan pendidikan nasional ini meliputi pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sistem penjaminan mutu memiliki peran penting dalam mengendalikan pelaksanaan pendidikan oleh lembaga pendidikan dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sistem ini tidak hanya berfokus pada pencapaian standar minimal, tetapi juga pada peningkatan kualitas yang berkelanjutan di semua aspek pendidikan, mulai dari input, proses, hingga output.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di pendidikan dasar dan menengah bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa seluruh lembaga pendidikan dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). SPMI menekankan perbaikan dari dalam, melalui evaluasi diri, pengembangan rencana mutu, dan implementasi perbaikan secara internal. Sedangkan SPME, yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), berfokus pada penilaian kinerja lembaga pendidikan dari sudut pandang yang lebih objektif, memastikan bahwa standar mutu yang ditetapkan pemerintah benar-benar dipenuhi.

Penjaminan mutu ini bersifat dinamis, artinya lembaga pendidikan terus didorong untuk memperbarui dan meningkatkan mutu pendidikan seiring perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Dengan demikian, baik melalui SPMI maupun SPME, tujuan akhir dari penjaminan mutu adalah memastikan bahwa peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang optimal, dengan hasil yang relevan bagi pengembangan pribadi dan profesional mereka di masa depan.

Referensi

Jurnal

- Ardika, I. Wayan Dana, AA Raka Sitawati, and Ni Ketut Suciani. (2017). Fenomena Pokok Pendidikan Indonesia: Apa Dan Bagaimana?. *SOSHUM: Jurnal Sosial dan Humaniora* (Journal of Social Sciences and Humanities).
- Harvey, L., & Green, D. (1993). *Defining Quality*. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 18(1), 9-34.
- Trow, M. (1996). *Trust, Markets and Accountability in Higher Education: A Comparative Perspective*. *Higher Education Policy*, 9(4), 309-324.

Buku

- Abdullah, Burhanuddin. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- BAN-S/M. (2019). *Panduan Akreditasi Sekolah/Madrasah*. Jakarta: BAN-S/M.
- Fattah, Nanang. (2006). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- H., Bambang dan Hadi Wiardjo. (2015). *Sistem Manajemen Mutu*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2001). *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Ismanto. (2009). *Manajemen Syari'ah; Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juran, Joseph M. Juran's. (1988). *Quality Handbook*. New York: McGraw-Hill.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Mulyasa, E. (2012). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, M. Nur. (2005). *Manajemen Mutu Terpadu*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raharjo, Sabar Budi. dkk. (2019). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sallis, Edward. (2005). *Total Quality Management In Education*. London: Kogan Page.
- Sani, Ridwan Abdullah. dkk. (2015). *Pedoman Mutu Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharyanto, Hadriyanus dan Agus Heruanto Hadna. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2006). *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syafaruddin dan Mesiono. (2006). *Pendidikan Bermutu Unggul*. Bandung: Citapustaka Media.
- Syafaruddin. (2016). *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Tjiptono, Fandy dan Anastasia Diana. (2003). *Total Quality Management*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wibowo. (2012). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- World Bank. (2020). *Education in Indonesia: A White Paper on Policy Options to Improve Learning Outcomes*. Jakarta: World Bank Group.